

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN

#### A. Komunikasi Nonverbal

##### 1. Pengertian Komunikasi Nonverbal

Komunikasi nonverbal adalah proses yang dialami oleh seseorang individu atau lebih pada saat menyampaikan isyarat-isyarat nonverbal yang memiliki potensi untuk merangsang makna dalam pikiran individu atau individu-individu lain.<sup>1</sup> Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis walau tidak terdapat kesepakatan tentang proses nonverbal ini, kebanyakan ahli setuju bahwa hal-hal berikut mesti dimasukkan seperti isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata, postur, gerakan tubuh, sentuhan, pakaian, artefak, diam, ruang, waktu dan suara.<sup>2</sup>

Komunikasi nonverbal juga dapat diartikan sebagai penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata, komunikasi ini menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, intonasi nada (tinggi-rendahnya nada), kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak, dan sentuhan-sentuhan. Dapat juga dikatakan bahwa komunikasi nonverbal adalah semua kejadian di sekeliling situasi komunikasi yang tidak berhubungan dengan kata-kata yang diucapkan atau dituliskan dan meliputi semua *stimulus* nonverbal yang dalam *setting komunikatif* digeneralisasikan oleh individu dan lingkungan individu yang memakainya.<sup>3</sup>

Tanda-tanda komunikasi nonverbal belum dapat diidentifikasi seluruhnya, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa cara duduk, berjalan, berpakaian, semuanya itu menyampaikan informasi pada orang lain. Tiap-tiap gerakan yang dibuat dapat menyatakan asal seseorang, sikap, kesehatan, bahkan keadaan psikologis. Misalnya, gerakan-gerakan seperti mengerutkan alis, menggigit bibir, menunjuk dengan jari, tangan di pinggang, dan melipat tangan bersilang di dada.

##### 2. Fungsi Komunikasi Nonverbal

Komunikasi nonverbal dapat menjalankan sejumlah komunikasi penting. Periset nonverbal mengidentifikasi enam fungsi utama komunikasi nonverbal sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Andriana, *Pemahaman*, h.118.

<sup>2</sup>Deddy Mulyana, *Komunikasi Antar Budaya* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), h.12.

<sup>3</sup>Alo Lili Weri, *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya* (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 177.

- a. Untuk mengulangi perilaku verbal, misalnya menganggukkan kepala ketika mengatakan “ya”.
- b. Untuk menekankan atau melengkapi, komunikasi nonverbal digunakan untuk menonjolkan atau menekankan beberapa bagian dari pesan verbal. Misalnya saja tersenyum untuk menekankan suatu hal tertentu.
- c. Untuk menggantikan, misalnya mengatakan “oke” dengan tangan tanpa berkata apa-apa yang dapat digantikan dengan menganggukkan kepala untuk mengatakan “ya” atau menggelengkan kepala untuk mengatakan “tidak.”
- d. Untuk *meregulasi* perilaku verbal, contohnya mengerutkan bibir, mencondongkan badan ke depan, atau membuat gerakan tangan untuk menunjukkan bahwa anda ingin mengatakan sesuatu.
- e. Untuk menunjukkan *kontradiksi*, pesan verbal dapat bertentangan dengan gerakan nonverbal. Sebagai contoh, anda dapat menyilangkan jari anda atau mengedipkan mata untuk menunjukkan bahwa yang anda katakan adalah tidak benar.<sup>4</sup>

### 3. Klasifikasi Pesan Nonverbal

#### a. Kinesik atau Gerak Tubuh

Bidang yang menelaah bahasa tubuh adalah kinesika ( *kinesics*), suatu istilah yang diciptakan seorang perintis studi bahasa nonverbal, Ray L. Birdwhistell. Setiap anggota tubuh seperti wajah (termasuk senyuman dan pandangan mata), tangan, kepala, kaki dan bahkan tubuh secara keseluruhan dapat digunakan sebagai isyarat simbolik. Karena dalam hidup, semua anggota badan senantiasa bergerak.

##### 1) Isyarat Tangan

Penggunaan isyarat tangan dan maknanya jelas berlainan dari budaya ke budaya. Meskipun di beberapa Negara, telunjuk digunakan untuk menunjukkan sesuatu, hal itu tidak sopan di Indonesia. Tentu saja ada pengecualian, misalnya orang Batak dan orang Amerika, biasa menunjuk dengan telunjuk tanpa bermaksud kasar pada orang yang dihadapinya. Begitu juga orang Betawi, yang tidak jarang menunjuk dengan memajukan mulut, sambil

---

<sup>4</sup> Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, h.314.

berucap “*ke sono-no!*”, beberapa suku Afrika yang menunjuk dengan mencibirkan bibir bawah menganggap cara menunjuk Amerika sebagai kasar.<sup>5</sup>

## 2) Gerakan Kepala

Dibeberapa Negara, anggukan kepala malah berarti “tidak” seperti di Bulgaria, sementara isyarat “ya” di Negara itu adalah mengelengkan kepala. Orang Inggris, seperti orang Indonesia, menganggukan kepala bahwa mereka mendengar dan menyetujui.

## 3) Postur Tubuh dan Posisi Kaki

Postur tubuh sering bersifat simbolik, seseorang cenderung mengapresiasi berlebihan orang bertubuh tinggi dan seimbang. Banyak orang berusaha mati-matian untuk mencapai postur tubuh yang ideal dengan mengontrol makanan, berolahraga, mengonsumsi jamu atau obat, dan bahkan bedah plastik. Bahkan cara duduk, berdiri dan berbaring dapat mengomunikasikan serangkaian makna yang terbatas namun menarik.<sup>6</sup>

Menjamurnya pusat-pusat kebugaran diberbagai kota di Negara menunjukkan kecenderungan tersebut. Status seseorang juga dapat terlihat lewat cara ia meletakkan tangannya ketika berdiri dan berbicara dengan orang lain.

## 4) Ekspresi Wajah dan Tatapan Mata.

Kontak mata punya dua fungsi dalam komunikasi antar pribadi. Pertama, fungsi pengatur untuk memberi tahu orang lain apakah anda akan melakukan hubungan dengan orang tersebut atau menghindarinya. Kedua fungsi *ekspresif*, yaitu memberi tahu orang lain bagaimana perasaan anda terhadapnya. Tangan dan lengan adalah *transmisi* utama dari bahasa tubuh, namun gerakan dari kaki dan kepala juga penting. Mereka terkoordinasi secara dekat dengan cara berbicara dengan komunikasi verbal. Kode-kode bahasa tubuh bisa mengindikasikan bangkitnya emosi secara umum atau kondisi emosional yang spesifik.<sup>7</sup>

### b. Sentuhan (*Haptiks*)

Studi tentang sentuh – menyentuh di sebut haptika (*haptics*), seperti foto, adalah suatu perilaku nonverbal yang multi makna, dapat menggantikan seribu kata.

---

<sup>5</sup> Jhon R. Wenburg dan William, *The Personal Communication Process* (New York: Jhon Willey & Sons, 1973), h. 83.

<sup>6</sup> John Fiske, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.114.

<sup>7</sup> John Fiske, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.113.

Menurut Heslin terdapat lima kategori sentuhan yang merupakan sesuatu rentang dari yang sangat *impresional* hingga yang sangat *personal*. Kategori-kategori tersebut adalah :

- 1) *Fungsional-profesional*. Disini sentuhan bersifat “dingin” dan berorientasi bisnis, misalnya pelayan toko membantu pelanggan memilih pakaian.
- 2) Sosial-sopan. Prilaku dalam situasi ini membangun dan memperteguh pengharapan, aturan dan praktik sosial yang berlaku, misalnya berjabat tangan.
- 3) Persahabatan-kehangatan. Kategori ini meliputi setiap sentuhan yang menandakan *afeksi* atau hubungan yang akrab, misalkan dua orang yang saling merangkul setelah mereka lama berpisah.
- 4) Cinta. Kategori ini merujuk kepada sentuhan yang menyatakan ketertarikan emosional.<sup>8</sup>

#### c. *Paralinguistik* atau Suara

Parabahasa atau vokalia (vokalis), merujuk aspek-aspek suara selain ucapan yang dapat dipahami misalnya kecepatan berbicara berupa tinggi atau rendah, *intensitas* (volume), suara, intonasi, dialek, suara terputus putus, suara yang getar, suitan, siulan, tawa, tangisan, gerutuan, gumaman, desahan, dan sebagainya. Setiap karakteristik suara ini mengkomunitaskan emosi dan pikiran seseorang. Pesan *paralinguistik* adalah pesan nonverbal yang berhubungan dengan cara mengucapkan pesan verbal, satu pesan yang sama dapat menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan secara berbeda.<sup>9</sup>

Mehrabian dan Ferris menyebutkan bahwa parabahasa adalah hal terpenting kedua setelah ekspresi wajah dalam menyampaikan perasaan atau emosi. Menurut formula mereka, parabahasa punya andil 38% dari keseluruhan dampak pesan. Oleh karena ekspresi wajah punya andil 55% dari keseluruhan dampak pesan, dan lebih dari 90% isi emosionalnya ditentukan secara nonverbal.

#### d. Penampilan fisik

Bagaimana cara seseorang berpakaian, warna, model pakaian, menyisir rambut, merupakan unsur-unsur tampilan yang menunjukkan sebuah pesan. Simbol nonverbal seperti ini erat kaitannya dengan penilaian budaya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Rochajat Harun, *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 68.

<sup>9</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi: Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h.166.

<sup>10</sup> Alo liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna* (Jakarta: Kencana, 2011), h.387.

Setiap orang punya persepsi mengenai penampakan fisik seseorang, baik itu busananya (model, kualitas bahan, warna) dan juga ornament lain yang dipakai seperti kacamata, sepatu, tas, jam tangan, kalung, gelang, cicin, anting-anting, dan sebagainya. Seringkali orang juga memberi makna tertentu pada karakteristik fisik orang yang bersangkutan, seperti bentuk wajah, warna kulit, model rambut, dan sebagainya.

#### 1) Busana

Nilai-nilai agama, kebiasaan, tuntutan lingkungan yang tertulis atau tidak tertulis nilai kenyamanan dan tujuan pencitraan semua itu mempengaruhi dari cara kita berdandan. Banyak subkultural atau komunitas mengenakan busana yang khas sebagai simbol keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut, sebagian orang berpandangan bahwa pilihan atas pakaian mencerminkan kepribadiannya.

#### 2) Bau-bauan

Bau-bauan terutama yang menyenangkan (wewangian, seperti parfum) telah berabad-abad digunakan orang untuk menyampaikan pesan mirip cara yang dilakukan hewan. Perbedaan persepsi atas bau-bauan dapat menimbulkan kesalah pahaman ketika orang berbeda budaya berkomunikasi.

#### 3) Karakteristik fisik

Suatu studi menunjukkan bahwa daya tarik fisik merupakan salah satu ciri penting dalam teori pribadi, meskipun bersikap *implicit*. Orang yang menarik fisik secara ajen dinilai lebih pandai bergaul, luwes, tenang, hangat secara seksual, menarik, *responsive*, *persuasi* dan berhasil dalam karir dari pada orang yang tidak menarik. Ciri-ciri fisik seperti tinggi badan, warna kulit, warna rambut dan gaya sisiran serta bentuk wajah juga mengandung pesan nonverbal. Orang memberikan kesan mengenai orang lain berdasarkan ciri-ciri semuanya ini dan bergantung pada aspek nonverbal.<sup>11</sup>

#### e. *Proxemics* atau Penggunaan Ruang Personal dan Sosial

Setiap budaya punya cara khas dalam mengkonseptualisasi ruang, baik dalam rumah, di luar rumah maupun dalam hubungan dengan orang lain. Edward T. Hall adalah antropolog yang menciptakan istilah *proxemics* (proksemika) sebagai bidang studi yang menelaah persepsi manusia atas ruang (pribadi dan sosial), cara manusia menggunakan ruang dan pengaruh ruang terhadap komunikasi. Ada empat jarak yang biasanya digunakan yaitu jarak

---

<sup>11</sup> Muhammad Budyatna, *Teori Komunikasi Antarpribadi* (Jakarta: Kencana, 2011), h.138.

akrab (50 cm) pembicaraan untuk dua sahabat dekat, jarak pribadi (50-125 cm) yang terjadi secara sepintas atau kebetulan, jarak sosial (125 cm- 4 m) untuk urusan bisnis dan jarak umum (lebih dari 4 m) mengenai apa saja.<sup>12</sup>

#### f. Konsep Waktu

Waktu menentukan hubungan antara manusia, pola hidup manusia pada waktu dipengaruhi oleh budaya. Waktu berhubungan erat dengan perasaan manusia. Kronemika (*cronemics*) adalah studi dan interpretansi atas waktu sebagai pesan bagaimana kita mempersiapkan dan memperlakukan. Waktu sebagai simbolik menunjukkan sebagai jati diri, siapa diri kita dan kesadaran akan lingkungan.

#### g. Warna

Sering seseorang menggunakan warna untuk menunjukkan suasana emosional, cita, rasa, afiliasi politik dan bahkan mungkin meyakinkan agama. Dalam tiap budaya terdapat konvensi tidak tertulis mengenai warna pakaian yang layak dipakai ataupun tidak. Seperti halnya kaum wanita umumnya lebih bebas memilih warna pakaian dari pada pria. Hingga derajat tertentu antara warna tampaknya ada hubungan antara warna yang digunakan dengan kondisi fisiologi dan psikologis manusia.<sup>13</sup>

Menurut Johson, perilaku nonverbal memiliki beberapa ciri sebagai berikut:

1. Merupakan kebiasaan yang bersifat otomatis dan jarang disadari.
2. Berfungsi mengungkapkan perasaan yang sebenarnya, kendatipun dengan kata-kata seseorang berusaha menyembunyikannya.
3. Sarana utama untuk mengungkapkan emosi
4. Memiliki makna yang berlainan pada berbagai lingkungan budaya yang berbeda.
5. Memiliki makna yang berbeda dari satu orang kepada orang lain, atau pada orang yang sama namun berlainan waktu.<sup>14</sup>

## **B. Ilmu Politik dan Ruang Lingkup Politik**

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 134.

<sup>13</sup> Mulyadi, *Psikologi*, h. 318

<sup>14</sup> Supratiknya, *Komunikasi Antarpribadi: Tinjauan Psikologis* (Yogyakarta: KANSISUS, 1995), h.62.

Secara etimologi kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *polis* yang berarti kota atau Negara kota. Dari kata *polis* timbul istilah lain seperti *polite* artinya warga negara, *politicos* artinya kewarganegaraan, *politike techen* artinya kemahiran berpolitik dan selanjutnya orang-orang Romawi mengambil istilah tersebut serta menamakan pengetahuan tentang politik sebagai kemahiran tentang masalah-masalah kenegaraan.<sup>15</sup>

Istilah politik sering dikaitkan dengan bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik ataupun Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan sampai dalam pelaksanaan tujuan tersebut. Di samping itu juga menyangkut pengambilan keputusan tentang apakah yang menjadi tujuan sistem politik yang menyangkut seleksi antara beberapa alternatif serta penyusunan untuk membuat skala prioritas dalam menentukan suatu tujuan.<sup>16</sup>

Dilihat dari tujuannya, maka hakikat komunikasi politik adalah upaya sekelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai atau memperoleh kekuasaan demi mewujudkan tujuan pemikiran politik sebagaimana yang mereka harapkan.<sup>17</sup>

## 1. Budaya Politik

Menurut Arief Budiman budaya politik adalah berbagai macam ide yang dianut bersama banyaknya anggota masyarakat, tidak saja tentang masalah-masalah politik, tapi juga tentang aspek kehidupan dan perubahan masyarakat. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan teknis belaka. Perubahan dari sebuah orientasi ke atas menjadi individualisasi atau perubahan dari masyarakat feodal kepada masyarakat borjuis.<sup>18</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Almond dan Verba yaitu bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menjadi tujuan politik di antara masyarakat suatu bangsa. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup>Padmo Wahjono dan Nazaruddin Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.3.

<sup>16</sup>Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.492.

<sup>17</sup>Maswadi Rauf, *Indonesia dan Komunikasi Politik* (Gramedia Pustaka: Jakarta, 1993), h.10.

<sup>18</sup>Ismid Hadad, *Budaya Politik dan Keadilan Sosial* (Jakarta: LPJES, 1979), h.232.

<sup>19</sup>Ronald H. Chilcote, *Teori perbandingan politik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h.229.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap budaya politik secara teoritis beberapa hal berikut dapat dijadikan sebagai pedoman:

- a. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, takhayul dan mitos. Semuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan alasan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dari norma lain.
- b. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Pada aspek doktrin menekankan pada isi atau materi, sama seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Sedangkan aspek generik menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik.
- c. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.
- d. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup. Dengan memahami hubungan antara kebudayaan politik dan pelaksanaan sistemnya, akan lebih dapat menghargai cara-cara yang lebih membawa perubahan, sehingga sistem politik lebih demokratis dan stabil.<sup>20</sup>

Adapun tipe-tipe budaya politik yaitu:

- a. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, disebabkan faktor kognitif, misalnya tingkat pendidikan relatif rendah, serta menyangkut budaya yang terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil, karena wilayah yang terbatas seringkali perilaku politik memainkan peranannya, maka tidak terdapat peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri.

- b. Budaya Politik Kaula (subjek)

Politik kaula yaitu budaya politik masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output, atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan.

---

<sup>20</sup>A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 269.

### c. Budaya Politik Partisipan

Budaya partisipan yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik, dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung.<sup>21</sup>

## 2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan seseorang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri, dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa, sedangkan menurut Rush Pengertian partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai kepada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.<sup>22</sup>

Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik ini menjadi:

- a. Kelas yaitu individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
- b. Kelompok atau *komunal* yaitu individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
- c. Lingkungan adalah individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilirnya) berdekatan.
- d. Partai yaitu individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama dan berusaha meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan.

---

<sup>21</sup> Gabriel A. Almond, and Bingham, *Comparative Politics Today*, ed III (Canada: Little Brown and Company Canada Limited, 1998), h. 37-38.

<sup>22</sup> Michael Rush, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.35

- e. Golongan atau faksi yaitu individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan *patron-client*, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.<sup>23</sup>

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:

- 1) Kegiatan pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
- 2) *Lobby* yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
- 3) Kegiatan organisasi yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
- 4) *Contacting* yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka.
- 5) Tindakan kekerasan (*violence*) yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembutuhan politik (*asasination*), revolusi dan pemberontakan.<sup>24</sup>

### 3. Politik dalam Pandangan Islam

Islam adalah agama yang *syammil mutakammil* (sempurna dan paripurna), Islam bukan hanya mengatur masalah ritual *ubudiyah* saja, tapi seluruh aspek kehidupan manusia, bahkan sampai ke hal-hal terkecil dalam kehidupan manusia. Jika Islam hanya mengatur masalah-masalah ibadah saja, tanpa mengatur masalah sosial budaya, pendidikan, tata Negara/pemerintahan, dan sosial politik, maka sama saja Islam dengan agama lain, tidak ada keistimewaan Islam dibandingkan agama-agama lainnya.

---

<sup>23</sup>Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, terj. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 9-10.

<sup>24</sup>Samuel P. Huntintong dan Joan M. Nelson “ *No Easy Choise: Political Participation in Depoloving Countries*”, dalam Miriam Budiharjo, *Partisipasi dan Partai Politik Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), h. 16-19.

Agama Islam diturunkan Allah Swt kepada umat Islam dengan tujuan menjadi petunjuk dan pedoman dalam setiap kehidupan, termasuk dalam konteks kehidupan politik. Karena itu sudah sepatutnya kita merujuk kepada tuntutan Alquran dan sunnah Rasulullah dalam menjalankan praktek politiknya. Dalam bahasa arab kata *siyasah* (politik/ketatanegaraan) berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>25</sup>

Meskipun kata *siyasah* tidak terdapat dalam Alquran, baik dalam ayat *makiyah* maupun *madaniyah* bahkan tidak terdapat satu katapun definisi dari kata *siyasah* baik sebagai kata kerja maupun kata sifat, namun bukan berarti bahwa Alquran tidak menguraikan soal politik. Akan tetapi banyak kata lain yang mempunyai makna yang sama dengan kata *siyasah*.

Uraian Alquran tentang politik secara sepintas dapat dikemukakan pada ayat-ayat yang berakal dari kata hukum. Kata ini pada mulanya berarti “menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan.” Dari akar kata yang sama terbentuk kata *hikmah*, yang pada mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal makna kata *sasa-yasusu-sais-siyasah*, yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali dan cara pengendalian.

Ibnu Khaldun juga menegaskan bahwa

Apabila konsep politik bertumpu pada pemikiran manusia semata hanya bermanfaat di dunia saja, tanpa membawa kemaslahatan hingga akhirat, dan jika berbagai peraturan (politik) ini berasal dari cendekiawan, pembesar negara dan para ahli, maka itu adalah politik rasional, dan jika ditetapkan dari Allah, sebagai pembuat syariat yang ia tetapkan dan syariatkan, maka ia merupakan politik agama yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Itu disebabkan karena tujuan mereka bukan hanya di dunia, karena ia adalah sia-sia dan bathil dimana hilirnya hanyalah kematian dan kefanaan.<sup>26</sup>

Pemikiran Ibn Khaldun ini menggaris bawahi bahwa setiap gerak politik umat Islam harus berlandaskan ajaran agama Islam yang bersumber langsung dari Allah Swt. Hal ini dimaksudkan agar cita-cita luhur dari politik ini dapat direalisasikan di tengah-tengah umat, yaitu membawa kemashlahatan masyarakat baik di dunia maupun akhirat.

Muhammad Natsir sebagaimana dikomentari oleh Mohammad Daud Ali dan Habibah daud menegaskan bahwa:

---

<sup>25</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al Shadr, 1968), Juz 6, h.108.

<sup>26</sup> Dhuroruddin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, cet I, 2008), h.vii.

Islam itu melingkupi segenap bidang hidup, tiada satu bidangpun, termasuk politik atau negara yang dapat dipisahkan daripadanya. Kriteria yang dipergunakan adalah ajaran Alquran dan Sunnah Nabi dalam masa risalahnya membentuk suatu umat bermasyarakat yang dibina dengan peraturan-peraturan dan sikap serta kecenderungan tertentu, yang mempunyai hubungan teratur dengan golongan dan bangsa lain. Semuanya disertai pentadbiran yang kemudian dapat kita kenal dengan nama negara dan terletak dalam bidang yang kemudian disebut politik.

Berdasarkan pemikiran Muhammad Nasir ini tampak bahwa ajaran Islam menyandarkan urusan negara atau politik pemerintahan kepada landasam ideal umat, yaitu Alquran dan sunnah (hadis). Muhammad Nasir kembali mengatakan bahwa “pimpinan yang diberikan oleh Rasulullah termasuk pimpinan hidup bermasyarakat, ajaran yang diberikan Islam termasuk ajaran tentang hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu, suatu pemerintahan dalam negeri Islam haruslah pula mengikuti pedoman ini.

Dale F.Eickelman dan Jamnes Piscatori menegaskan bahwa politik dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam itu sendiri. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh kedua tokoh ini bahwa politik dalam ajaran Islam “ Dibangun atas contoh dari Nabi, yang pada saat bersamaan bertindak sebagai pemimpin spiritual sekaligus pemimpin komunitas politik. Dipertahankannya institusi kekhalifahan juga didasarkan atas keyakinan bahwa kekuasaan agama dan politik harus digabungkan dalam satu atap, sehingga memungkinkan syariat Islam bisa diterapkan dan komunitas muslim terlindungi.”<sup>27</sup>

Amanah risalah dalam pengertiannya yang luas menegaskan bahwa manusia adalah makhluk *siyasah* yang bertanggungjawab atas terpeliharanya keteraturan hidup di tengah-tengah masyarakat manusia dan lingkungan hidupnya, sedangkan *siyasah* memakmurkan bumi dalam Islam memiliki tujuan dan sekaligus menjadi cara, jalan dan sarana untuk meraih tujuan yang lebih mulia dan lebih abadi, yaitu keselamatan kehidupan yang lebih bermakna dan kekal, kehidupan akhirat.<sup>28</sup>

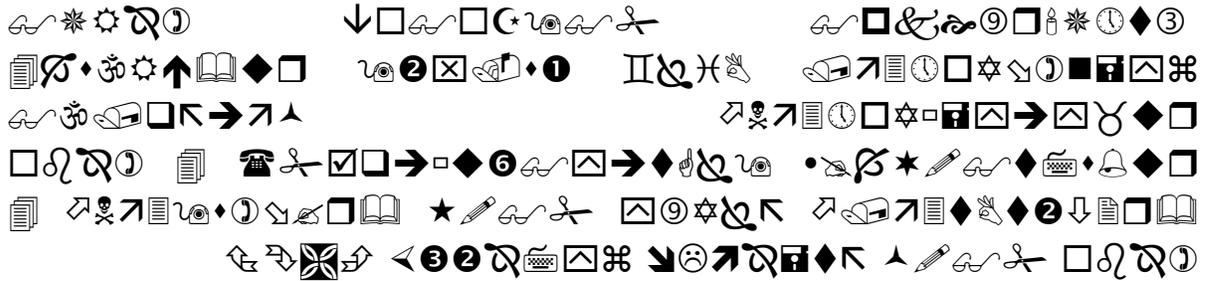
Berikut ini akan dijelaskan tentang ayat Alquran yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antara ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti:

---

<sup>27</sup>Dale F. Eickelman, James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim* (Bandung : Mizan, 1998), h.60.

<sup>28</sup>Abu Ridha, *Amal Siyasi : Gerakan Politik dalam Dakwah* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), h.45.

# 1. Prinsip Umat

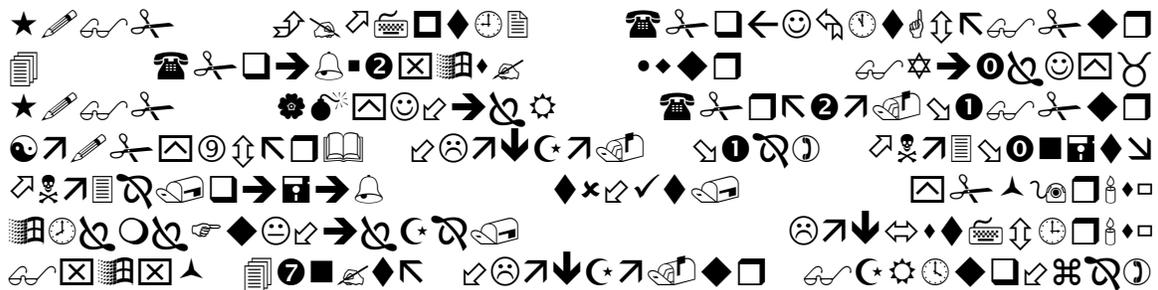


Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>29</sup>

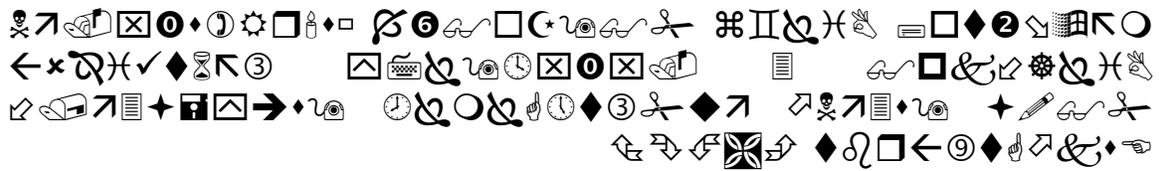
Dalam hal ini Alquran menegaskan bahwa manusia diciptakan hidup berkelompok dan hal itu mempunyai hikmah, yaitu agar saling kenal mengenal. Sehubungan dengan hal tersebut, organisasi kemasyarakatan, menurut Ibn Khaldun merupakan suatu kemestian bagi manusia. tanpa hal itu, eksistensi mereka sebagai makhluk sosial tidak akan sempurna, sebagaimana kehendak Allah menjadikan mereka sebagai khalifah di bumi ini untuk memakmurkannya.<sup>30</sup>

Dalam kenyataan sosial, karakter manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kerjasama antara satu dengan lainnya dan hidup berkelompok. Setiap kelompok dapat dibedakan dari segi keyakinan dan agama yang dianut, dari segi etnis, geografis, prinsip politik, pandangan hidup, adat istiadat dan sebagainya.<sup>31</sup>

# 2. Persatuan dan Persaudaraan



<sup>29</sup> Q.S. Al-Hujarat/49:13.  
<sup>30</sup> Muqaddimah, *Dar al-Fikr*, Bairut, t.th., h.41  
<sup>31</sup> Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), h.126.

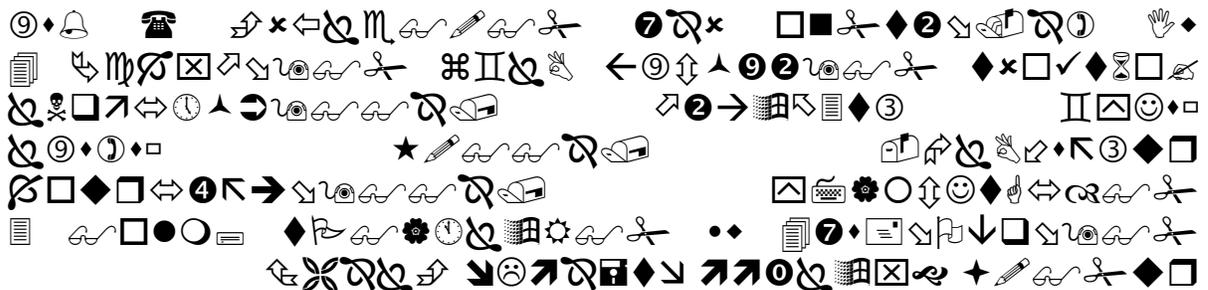


Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.<sup>32</sup>

Pesan yang dimaksud dari ayat di atas adalah berpegang teguhlah, yakni upayakan sekuat tenaga untuk mengaitkan diri satu dengan yang lain dengan tuntutan Allah sambil menegakkan disiplin tanpa kecuali. Sehingga kalau ada yang lupa ingatkan dia, atau ada yang tergelincir bantu dia bangkit agar dapat bergantung kepada tali agama Allah.<sup>33</sup>

Suatu bangsa, umat dan Negara tidak akan berdiri tegak bila di dalamnya tidak terdapat persatuan dan persaudaraan warganya dan hal ini tidak akan terwujud tanpa saling bekerja sama dan mencintai. Setiap jamaah yang tidak diikat oleh ikatan kerja sama dan kasih sayang serta persatuan yang sebenarnya, tidak mungkin bersatu dalam satu prinsip untuk mencapai tujuan bersama. Persatuan dan persaudaraan suatu umat atau jamaah merupakan fondasi dan faktor perekat terbentuknya sebuah negara.<sup>34</sup>

### 3. Prinsip Kebebasan



---

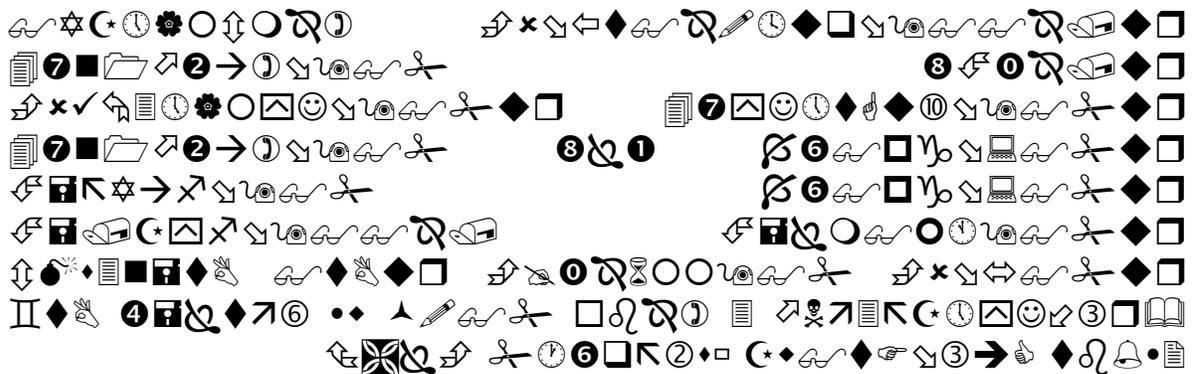
<sup>32</sup>Q.S. Ali imran/3:103.  
<sup>33</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 205  
<sup>34</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan, *Sirat Nabawiyat*, terj. Aunur Rafiq Shaleh (Jakarta: Rabbani Press, cet.2, 1991), h.15.

Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>35</sup>

Prinsip kebebasan mutlak perlu dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya guna terjaminnya keutuhan masyarakat *pluralistik*. Kebebasan-kebebasan yang dibutuhkan manusia adalah kebebasan beragama, perbudakan, kebebasan dari rasa takut, menyatakan pendapat dan lain-lain.<sup>36</sup> Kebebasan merupakan salah satu hak dasar hidup setiap orang dan merupakan pengakuan seseorang atau kelompok dan kemuliaan harkat kemanusiaan orang lain. Setiap orang dan pemerintah wajib melindungi dan menghormati hak orang lain dalam menganut suatu agama dan keyakinannya.

Ayat tersebut merupakan salah satu bukti prinsip kebebasan dalam hal beragama, bahwa tidak membenarkan siapapun memaksa orang lain untuk menganut agama Islam. Setiap orang diberi hak kebebasan untuk memilih agama yang dikehendakinya, dan nabi Muhammad telah mempraktekkannya ketika beliau menjadi seorang Nabi sekaligus pemimpin. Prinsip kebebasan beragama yang diundangkan dalam piagam Madinah telah membuka babak baru dalam kehidupan berpolitik dan peradaban dunia saat itu.<sup>37</sup>

#### 4. Prinsip Tolong Menolong



Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan teman sejawat, Ibnu sabil dan

<sup>35</sup> Q.S. Al-Baqarah /2: 256.

<sup>36</sup> Harun Nasution, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h.xi.

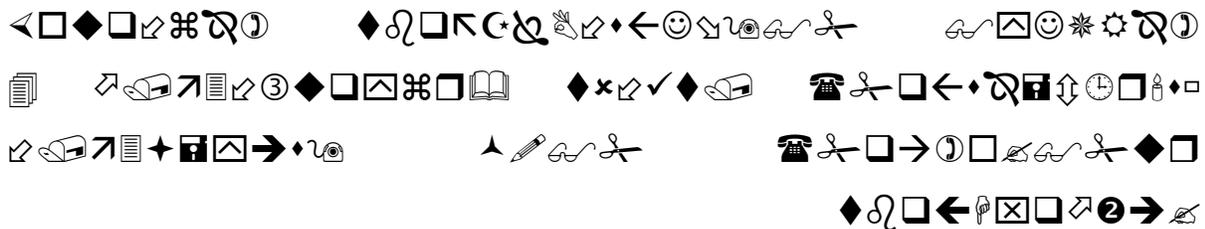
<sup>37</sup> Muhammad Husein Haikal, *Hayat Muhammad*, terj Ali Audah (Jakarta: Litera Antarnusa, 1990), h.205.

hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.<sup>38</sup>

Ayat ini mengandung ajaran tentang kewajiban terhadap manusia dari berbagai kalangan atau strata sosial, baik yang dekat maupun yang jauh. Selain itu orang-orang yang berkecukupan dalam bidang materi harus mensucikan hartanya dari yang menjadi hak-hak orang mukmin, kaum kerabat, anak yatim, dan orang yang sedang dalam perjalanan, dengan sukarela kepada orang yang membutuhkannya. Setelah itu diingatkan, hendaknya bermua'malah dengan baik bersama macam-macam golongan manusia, dan tidak kikir kepada mereka pada waktu-waktu susah dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah.<sup>39</sup>

Ayat- ayat yang berdimensi sosial tersebut juga menghendaki agar setiap orang dalam suatu Negara mempunyai kepedulian sosial dan tanggung jawab moral dalam membantu orang-orang yang berekonomi lemah, agar mereka terentaskan dari himpitan kemiskinan.

#### 5. Perdamaian



Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.<sup>40</sup>

Ayat ini memerintahkan orang-orang mukmin agar menciptakan perdamaian di lingkungan interen mereka. Orang-orang mukmin yang lain mendamaikan kedua golongan mukmin yang berperang itu dengan mengajak kepada hukum Allah baik yang berkaitan dengan hak-hak maupun kewajiban keduanya secara adil. Orang-orang mukmin yang bertindak sebagai juru damai harus berlaku adil dan jujur, tanpa berpihak kepada siapapun dengan mengambil posisi netral sebagai arbitrator dan tidak mengambil keuntungan

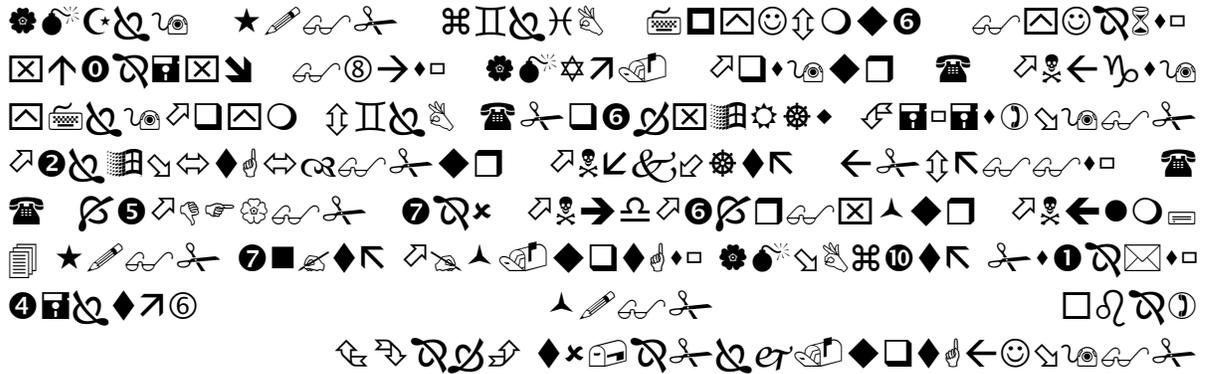
<sup>38</sup> Q.S. An-Nisa /4: 36.

<sup>39</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir al-Maraghi*, terj. Ansori Umar (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), juz v, h.53.

<sup>40</sup> Q.S. Al-Hujarat/49:10.

ekonomis dan politis. Persaudaran orang mukmin harus disandarkan pada dasar keimanan, karena itu mendamaikan dua golongan yang berkonflik harus dengan alasan agama.<sup>41</sup>

## 6. Musyawarah



Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.<sup>42</sup>

Al-Thabari dalam menafsirkan ayat di atas menyatakan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh nabinya agar bermusyawarah dengan umatnya tentang urusan yang akan dilaksanakan supaya mengetahui hakikat urusan tersebut, dengan demikian mereka mengikuti jejaknya, yakni bermusyawarah diantara mereka ketika berhadapan dengan suatu masalah. Muhammad abduh melihat musyawarah secara fungsional adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan masalah-masalah masa depan pemerintahan. di sisi lain, pelaksanaan musyawarah merupakan penghargaan kepada para pemimpin masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai urusan dan kepentingan bersama.<sup>43</sup>

Seseorang yang melakukan musyawarah, apalagi yang berada dalam posisi pemimpin, yang pertama harus ia hindari ialah tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala, karena jika tidak, mitra musyawarah akan bertebaran pergi. Di sisi lain, yang bermusyawarah harus menyiapkan mentalnya untuk selalu bersedia memberi maaf karena boleh jadi, ketika

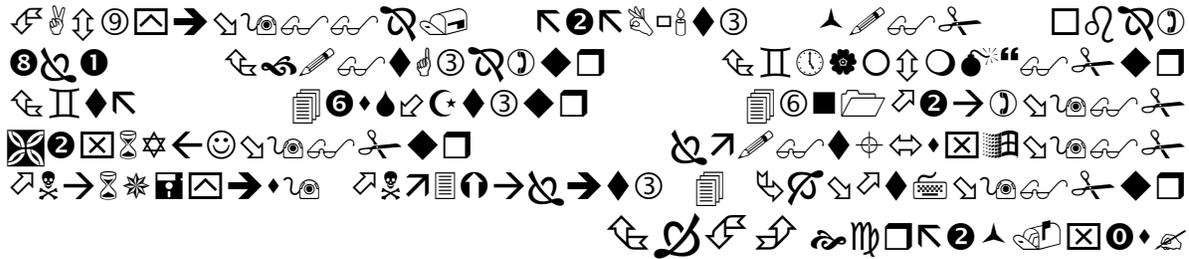
<sup>41</sup> Ahmad, *Al-Maraghi*, juz 26 , h.131.

<sup>42</sup> Q.S. Ali-Imran /3:159.

<sup>43</sup> Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim*,( Singapura: al-Haramain, t.th), jilid I, h.420.

melakukan musyawarah, terjadi perbedaan pendapat atau keluar dari pihak lain kalimat atau pendapat yang menyinggung, bahkan boleh jadi mengubah musyawarah menjadi pertengkaran.<sup>44</sup>

## 7. Keadilan



Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>45</sup>

Kata *al-adl* dalam Alquran menurut al-Baidawi bermakna “pertengahan dan persamaan”. Perintah berlaku adil ditujukan kepada dua hal, yaitu perintah menetapkan hukum atau menyelesaikan suatu masalah dengan adil, dan perintah berlaku adil bagi orang yang menetapkan hukum dan menyelesaikan suatu masalah.

Dalam kaitannya dengan upaya menegakkan keadilan bisa melalui kekuasaan umum, peradilan dan *tahkim* dalam kasus-kasus tertentu, artinya siapa saja yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk memimpin orang lain, dalam upaya menegakkan keadilan dijelaskan bahwa menetapkan keadilan dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah secara terus menerus memerintahkan hambanya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan perbuatan.

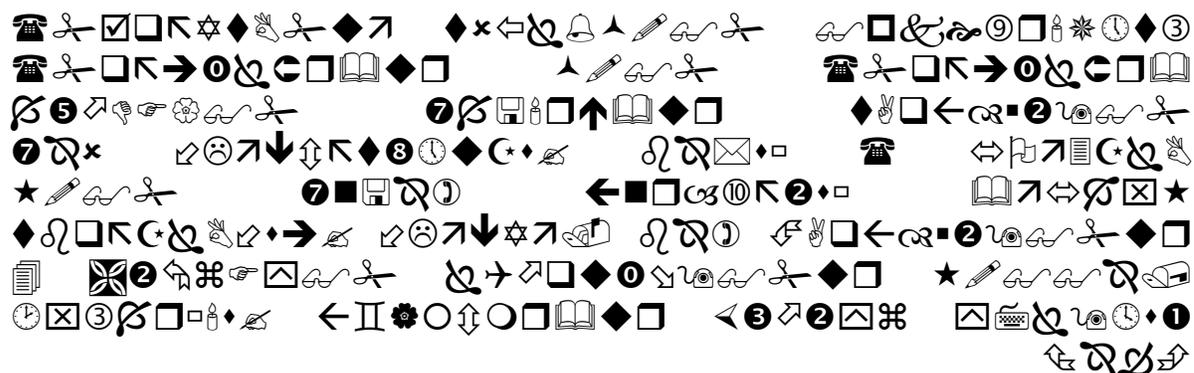
Beberapa pakar mendefenisikan adil dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya, ini mengantarkan kepada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi

<sup>44</sup>Shihab, Tafsir al- Misbah, h.313.

<sup>45</sup>Q.S. An-Nahl/16: 90.

tidak sama. Ada juga yang mengatakan bahwa adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat.<sup>46</sup>

## 8. Prinsip Kepemimpinan



Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>47</sup>

Dalam kehidupan bersama diperlukan adanya pemimpin dalam suatu masyarakat yang teratur, jika timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mesti ada penyelesaian mekanisme pemimpin dengan fungsinya yang jelas, ataupun untuk menggerakkan masyarakat itu supaya mengambil keputusan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kesepakatan bersama.<sup>48</sup>

Ayat ini mengandung dua perintah, yaitu perintah agar orang-orang mukmin mentaati Allah dan rasulnya serta para umara, hakim, ulama, panglima perang, *ulil amri* dan seluruh pemimpin yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum.<sup>49</sup> Perintah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan harus dikembalikan kepada Allah, Rasulnya dan *ulil amri*. Perintah kedua ini jelas sebagai konsekuensi dari perintah pertama agar taat kepada Allah dan Rasul. Ketaatan melaksanakan perintah kedua sebagai bukti kebenaran iman kepada Allah dan hari kemudian.

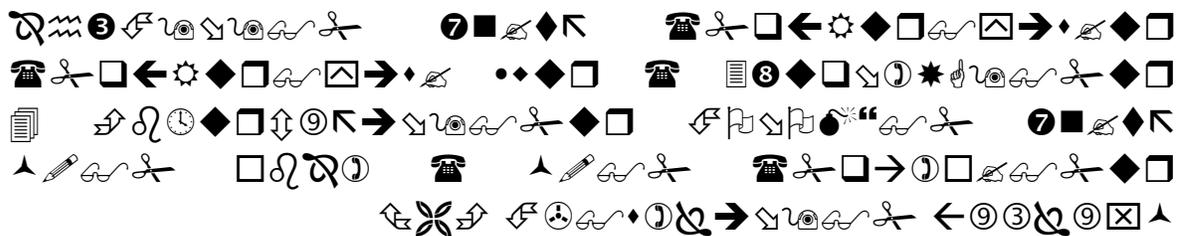
## 9. Ketakwaan, Amar ma'ruf dan Nahi Mungkar

<sup>46</sup>Shihab, *Tafsir al- Misbah*, h.697.

<sup>47</sup>Q.S. An-Nisa/5:59.

<sup>48</sup>Deliar Noer, *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal* (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984), h.145.

<sup>49</sup>*Al-Maraghi*, juz 5, h. 119.



Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>50</sup>

Ketakwaan orang mukmin mengandung dua dimensi. pertama dimensi ketuhanan, yaitu hubungan manusia dengan Allah untuk bertakwa kepadanya, kedua dimensi sosial yaitu menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* demi terwujudnya ketertiban sosial. Oleh karena itu, prinsip ketakwaan, *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai asas Negara, menuntut masyarakatnya di samping bertakwa kepada Allah, juga harus mempunyai kepedulian sosial. Tipe masyarakat dan pemerintahan yang seperti inilah yang dicita-citakan Islam, yakni suatu Negara di mana masyarakat dan pemerintahannya berusaha menciptakan masyarakat beriman dan bertakwa dan mengamankan kepentingan pemerintahan dalam mencapai tujuannya.<sup>51</sup>

Selain persoalan politik diketahui dari sumber utama, yakni Alqura, dalam hadis-hadis nabi juga banyak dilihat aturan-aturan berpolitik sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Salah satunya adalah menjadikan agama sebagai sandaran menjalankan politik sehingga tidak menyimpang dari kaidah-kaidah kebaikan, sebagaimana hadis berikut:

عن ابي رقية تمم بن اؤس الدارى رضى الله عنه: ان رسولا الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة, قلنا: لمن

قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامنتهم (رواه مسلم)

(Tamim) bin Aus Addary ra berkata: bersabda Nabi SAW: Agama itu nasehat. Kami

<sup>50</sup>Q.S. Al-Maidah /5:2.

<sup>51</sup> Mohamed S. Elwa, *System Politik dalam Pemerintahan Islam*, terj. Anshori Thayib, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), h.103.

bertanya: untuk siapa? jawab Nabi: Bagi Allah dan Kitab-kitab-Nya, dan Rasul-Nya, dan pemimpin-pemimpin serta muslim pada umumnya. (HR. Muslim).<sup>52</sup>”

Hadis ini menegaskan bahwa segala sesuatu urusan harus dilandaskan pada ajaran agama Islam. Termasuk dalam menjalankan roda pemerintahan atau perpolitikan sehingga tercipta kebaikan atau kemaslahatan bagi masyarakat. Kemudian dalam menerapkan aturan atau hukum Pemerintah perlu menegakkan secara tegas.

#### **4. Hambatan-hambatan dalam Komunikasi**

Komunikasi secara sederhana diartikan sebagai penyampaian informasi yang jelas dan ditangkap secara baik oleh pendengar. Komunikasi yang baik dan efektif apabila dilaksanakan dua arah, ada mendengar ada berbicara atau ada umpan balik. Namun tidak jarang masih dijumpai pesan atau informasi yang di sampaikan tidak sesuai atau mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Alvinaro Ardianto menuliskan beberapa hambatan komunikasi yaitu :<sup>53</sup>

##### **a. Hambatan Psikologis**

###### **1. Perbedaan Kepentingan**

Kepentingan akan membuat seseorang selektif dalam menanggapi atau menghayati suatu pesan. Seseorang hanya akan memperhatikan perangsang yang ada hubungannya dengan kepentingannya, bukan hanya memengaruhi perhatian saja, tetapi juga menentukan daya tanggap, perasaan, pikiran dan tingkah laku seseorang.

###### **2. Prasangka**

Prasangka merupakan salah satu rintangan atau hambatan berat bagi suatu kegiatan komunikasi, karena orang yang mempunyai prasangka belum apa-apa sudah bersikap curiga dan menentang komunikator yang hendak melancarkan komunikasi.<sup>54</sup>

###### **3. Stereotip**

---

<sup>52</sup> Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Annawawi, *Tarjamah Riyadhus shalihin* , Alih bahasa: H. Salim Bahreisy (Bandung : Al-Ma'arif, 1997), h.186.

<sup>53</sup>Elvinaro Ardianto, *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, cet.2, 2009 ), h.89.

<sup>54</sup>Onong Uchana, *Dinamika Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h.13.

Stereotipe adalah pandangan atau penilaian mengenai sifat-sifat dan watak pribadi suatu individu atau golongan lain yang bersifat subjektif, tidak tepat dan cenderung negatif karena tidak lengkapnya informasi yang didapatkan.<sup>55</sup> Timbulnya *stereotype* dalam diri seseorang adalah sebagai akibat pengaruh suatu persepsi tertentu dan berfungsi untuk menyakinkan diri sendiri. Adanya fungsi seperti itu antara lain disebabkan oleh akibat terjadinya hubungan dikalangan dua kelompok yang berbeda.

#### 4. Motivasi

Motif merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu. Motif memberi tujuan dan arah pada tingkah laku manusia yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Semakin sesuai pesan komunikasi dengan motivasi seseorang maka akan semakin besar komunikasi tersebut dapat diterima oleh komunikan.

##### b. Hambatan Sosio-Kultural

Banyaknya etnis yang tersebar di suatu tempat memunculkan beraneka ragam budaya dan bahasa serta tradisi lokal. Hal ini tentunya merupakan tantangan sekaligus hambatan dalam melakukan komunikasi, untuk mengatasi hambatan ini, seorang komunikator harus mengerti lingkungan dan situasi objek komunikasinya.

Selain itu faktor semantik juga menghambat dalam proses komunikasi. Gangguan jenis ini bersangkutan dengan pesan komunikasi yang pengertiannya menjadi rusak. Gangguan semantic tersaring ke dalam pesan melalui penggunaan bahasa. Lebih banyak kekacauan mengenai pengertian suatu istilah atau konsep yang terdapat pada komunikator, akan lebih banyak gangguan semantic dalam pesannya. Gangguan ini terjadi dalam salah pengertian.<sup>56</sup>

##### c. Hambatan Interaksi Verbal

Hambatan interaksi verbal dapat berupa polarisasi (kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikannya dalam bentuk ekstrem), sedangkan indiskriminasi terjadi apabila komunikan memusatkan perhatian pada kelompok orang, benda atau kejadian serta tidak mampu melihat bahwa masing-masing bersifat unik atau khas dan perlu diamati secara individual.

---

<sup>55</sup>Ujang Saefullah, *Kapita Selekta Komunikasi: Pendekatan Budaya dan Agama* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2013), h.217.

<sup>56</sup>Effendi, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h.46.

## C. Latar Belakang Terbentuknya Partai Aceh

### 1. Konflik di Aceh

#### a. Pemberontakan Darul Islam

Pemberontakan Daub Beureeh lebih dikenal dengan sebutan darul Islam dan merupakan embrio bagi gerakan separatis di Aceh yang didukung oleh para pemimpin dan ulama Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh adanya perlakuan tidak adil dan rasa frustrasi yang telah meluas terhadap pemerintah pusat.<sup>57</sup>

Daud Beureueh tetap yakin bahwa rakyat Aceh bisa menyusun kekuatan dan membangkitkan moral perlawanannya sendiri. Bagi Daud Beureueh, Darul Islam Aceh bisa bangkit dan terus berjuang melanjutkan revolusi Aceh. Padahal pada saat itu tak mudah bagi Daud Beureueh untuk melawan Soekarno. Para tokoh Darul Islam banyak yang menyerah pada waktu itu. Sehingga kabinet Negara Bagian Aceh tinggal hanya 10 menteri, yang lainnya telah menyerah kepada Negara Republik Indonesia. Tokoh-tokoh muda DII/TII tetap mendukung perjuangan Darul Islam.

Daud Beureueh masih mempunyai semangat untuk melanjutkan DII/TII tersebut. Untuk meyakinkan pasukannya dan sekaligus untuk mengkonsolidasikan kekuatan perlawanannya, Daud Beureueh memproklamasikan berdirinya negara Republik Islam Aceh. Peristiwa ini ternyata mampu menjadi momentum membangkitkan semangat perlawanan rakyat Aceh pada Soekarno. Di bawah pimpinan Daud Beureueh, segala unsur masyarakat Aceh bersatu, kecuali segelintir orang yang merasa sakit hati yang masih tersisa, ataupun keluarga dekat kaum kontra revolusioner yang telah menjadi korban.

Dengan adanya proklamasi Republik Islam Aceh ini perlawanan rakyat Aceh menjadi terpisah dengan berbagai perlawanan rakyat di daerah lain. Aceh bukan lagi menjadi bagian dari perlawanan DI/TH. Bagi Daud Beureueh perjuangan Republik Islam Aceh adalah perang dan perjuangan *jihad* di bumi Aceh dan untuk rakyat Aceh semata. Diawal-awal pemberontakan, kaum pemberontak menguasai hampir seluruh Aceh dan 47 Proklamasi ala Daud Beureueh ini berbuntut pada perebutan kekuasaan di daerah pedesaan. Suasana diseluruh daerah Aceh terasa sangat revolusioner.

---

<sup>57</sup>Kamaruzzaman, *Komunikasi Politik Ulama Huda dalam Penyelesaian Konflik Aceh, Periode 1999-2000 Studi Kasus di Aceh Utara dan Kota Lhoksemawe* (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012 ), h.83.

Rakyat Aceh pada saat itu seakan tengah menyusun suatu perang terhadap kafir (*kafee*). Semua ini karena berkembang persepsi bahwa pemerintahan Soekarno telah mengkhianati rakyat Aceh. Rakyat menyaksikan secara langsung pemerintahan Soekarno yang telah banyak merugikan masyarakat Aceh yang hanya memberikan janji-janji manis kepada rakyat Aceh. Ketika rakyat melakukan perlawanan sengit, pemerintah Soekarno menjawabnya dengan pendekatan senjata.

Bekal persenjataan yang sangat minim pun menghambat perlawanan rakyat Aceh pada saat itu. Mereka mengalami kesulitan menguasai daerah-daerah yang sudah direbut. Pasukan Daud Beureueh selalu berhasil dihalau oleh pasukan TNI, walaupun demikian, mereka selalu berupaya melakukan perang gerilya diberbagai pedesaan. Hingga sebelum akhirnya sejarah Republik Islam Aceh, pasukan Daud Beureueh hanya solid di kawasan hutan dan pedesaan Aceh Pidie dan Aceh Utara. Lemahnya kekuatan militer dan minimnya persenjataan ini menjadikan pasukan Republik Islam Aceh lemah, jenuh dan agak frustrasi.

#### b. Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Gerakan Aceh Merdeka adalah sebuah pergerakan yang dipelopori oleh Dr. Hasan Muhammad di Tiro pada tanggal 4 Desember 1976 karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan pusat terhadap Aceh. Untuk mempercepat terlaksananya program GAM, maka disusunlah kabinet pertama Negara Islam Aceh (GAM disaat diproklamkan diberinama Negara Islam Aceh), pada tanggal 24 Mei 1977 di gunung Halimon Aceh Pidie.<sup>58</sup>

Nazaruddin menyebutkan bahwa pada tanggal tersebut muncul sebuah gerakan bawah tanah yang memproklamkan Aceh Merdeka yang tergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka oleh sekelompok intelektual Aceh. Pendirian negara ini merupakan pengalaman kedua di Aceh, setelah pada 21 September 1953 Ulama Aceh Daud Beureueh Menggabungkan Aceh ke dalam Gerakan Darul Islam.

Proklamasi GAM yang sederhana, dilakukan disuatu tempat menandakan bahwa pada awal-awalnya, gerakan ini adalah gerakan bawah tanah, yang dilakukan secara diam-diam. Isa Sulaiman menyebutkan fase awal pembentukan GAM 1976-1980 adalah fase konsolidasi kelompok, bukan fase perang senjata. Pada mulanya, gerakan ini dilakukan oleh Hasan Tiro melalui pendekatan kekeluargaan/kekerabatan setelah adanya komunikasi dengan beberapa

---

<sup>58</sup> Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka* (Jakarta: Madani Press, t.t.)

tokoh DI/TII dimasa Daud Beureueh seperti Tgk Zainal Abidin Tiro yang masih keluarganya.

Sebelum Hasan Tiro memproklamirkan Aceh Merdeka pada tahun 1976, sebelumnya beliau telah terlibat dalam peristiwa DI/TII, khususnya di Amerika Serikat. Tulisan-tulisan tentang Indonesia, mengisyaratkan pemikiran Hasan Tiro dan gagasan yang dipikirkan tentang Aceh Merdeka. Negara Aceh yang ingin dibentuk adalah Negara Aceh pada zaman Iskandar Muda, di mana Aceh mengalami kejayaan dan kemakmuran. Konsepsi Negara Aceh seperti itu sesungguhnya sudah sangat lama ada dalam benak Hasan Tiro.

Selain hal itu, Hasan Tiro juga menulis sebuah tulisan tentang demokrasi untuk Indonesia (1958). Pandangan Hasan Tiro di antaranya adalah:

1. Pancasila bukan filsafat, suatu ideologi yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu ia berpendapat bahwa Islamlah yang dijadikan filsafat atau ideologi negara.
2. Menolak bentuk ketatanegaraan Indonesia yang *unitaris*, karena bentuk itu menimbulkan dominasi suku. Ia lebih memilih negara federal yang pembagian daerahnya berdasarkan suku bangsa.

Tumbuhnya kelompok separatisme GAM di Aceh tidaklah lahir dalam arena yang kosong, tetapi berkaitan dengan dinamika politik, ekonomi, sosial dan pembangunan di Aceh yang menjadi latar belakangnya. Selain itu, tumbuhnya GAM di Aceh juga tak luput dari begitu banyaknya kepentingan aktor-aktor lain dibalik peristiwa-peristiwa konflik yang terjadi, apabila dirumus dari aspek asal usul perkembangannya.

## 2. Fase-fase Menyelesaikan Konflik

Pengaruh yang sangat dirasakan akibat konflik RI dan GAM adalah penderitaan rakyat, kerugian jiwa, harta, benda, perasaan tidak aman, dan perkembangan ekonomi daerah menjadi terganggu. Bahkan yang paling menyedihkan akibat konflik adalah umat Islam sendiri tidak dapat menjalankan syariat Islam dengan sempurna.<sup>59</sup>

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak terlibat bertekad untuk menciptakan kondisi aman

---

<sup>59</sup>Syukri, *Ulama Membangun Aceh* (Medan: IAIN Press, 2012), h. 185.

sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.<sup>60</sup>

Masyarakat Aceh yang sebagian besar pada waktu itu menghendaki adanya referendum bagi Aceh seperti yang diberikan oleh Presiden B.J. Habibie dalam menyelesaikan kasus Timor Timur. Namun tuntutan ini tidak memperoleh tanggapan dari pemerintah. Ketika Presiden B.J. Habibie mengunjungi Aceh pada 26 Maret 1999, beliau membuat sembilan janji.

Kepada rakyat Aceh, atas kekerasan yang terjadi di Aceh, Presiden B.J. Habibie meminta maaf kepada seluruh rakyat Aceh. Ia juga memerintahkan agar aparat keamanan tidak melakukan tindak kekerasan dan pertumpahan darah. Selanjutnya Presiden di Masjid Baiturrahman Banda Aceh memberikan janji kepada rakyat Aceh dengan perincian sebagai berikut:

1. Melanjutkan program pembebasan narapidana yang terlibat aksi politik pada tahun 1989-1998.
2. Meminta pemerintah daerah Aceh untuk membongkar kuburan massal korban DOM dan menguburkan kembali sesuai syariat Islam dengan segala biaya ditanggung pemerintah. Memberikan bantuan kesejahteraan dalam bentuk beasiswa bagi anak yatim, penyaluran kredit usaha, modal kerja atau bantuan lainnya kepada para janda, korban perkosaan, cacat dan bentuk *rehabilitas* ekonomi maupun *rehabilitas* sosial lainnya.
3. *Merehabilitas* dan membangun kembali bangunan desa-desa bekas wilayah operasi keamanan, termasuk rehabilitasi mental spritual bagi semua akses operasi keamanan.
4. Meningkatkan mutu pendidikan di Aceh, antara lain dengan meningkatkan status *madrasah* swasta menjadi negeri, memberikan fasilitas yang memadai, mendirikan *madrasah aliyah* unggulan, memberikan lahan untuk praktik dan usaha Unsyiah, IAIN dan Pesantren.
5. Menghidupkan kembali jaringan kereta api di Aceh.
6. Mengembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang.
7. Memperpanjang landasan pacu Bandara Iskandar Muda.

---

<sup>60</sup>Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, Tim Sosialisasi Aceh Damai, t.t. h.3.

8. Mengangkat 2.188 anak-anak korban DOM menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa testing. Wacana untuk pemberian syariat Islam dan khususnya Aceh juga digagas pada masa era pemerintahan B.J. Habibie.

Gagasan ini dituangkan pada Undang-Undang N0 44 Tahun 1999 yang mengatur penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Pasal 1 menyebutkan bahwa keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah, para ulama mempunyai kedudukan terhormat di daerah yang sebagian besar beragama Islam ini.<sup>61</sup>

Pada tanggal 8 November 1999 diadakan sidang umum masyarakat pejuang referendum (SU MPR) di Banda Aceh. Sebagian masyarakat Aceh menuntut untuk akhirnya pada 11 April 2001, Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2001 tentang langkah-langkah menyeluruh dalam penyelesaian kasus Aceh.

Menurut inpres ini, pendekatan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah Aceh adalah melalui politik, ekonomi, sosial dan hukum dan ketertiban masyarakat, kedua inpres ini isinya sama tentang langkah-langkah menyeluruh dalam penyelesaian kasus Aceh, baik dibidang ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Namun, meskipun jelas bahwa inpres tersebut ditargetkan berlaku dan selesai enam bulan, nyatanya setelah enam bulan hasilnya tidak pernah terdengar dan target waktu yang ditetapkan tidak pernah tercapai.<sup>62</sup>

Langkah ini dianggap sebagai antitesis dari langkah yang dibangun oleh Presiden Abdurrahman Wahid, khususnya ketika ada jeda kemanusiaan I dan II hingga *Moratorium*. Upaya itu sebagai suatu cara untuk menghentikan permusuhan dalam bentuk *cease fire* (gencatan senjata) tetapi disisi lain operasi operasi keamanan pun terus dilakukan.

Upaya yang dijalankan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik Aceh, mulai dari era Soekarno, Soeharto dan serangkaian kebijakan *desentralisasi*, berupa pemberian keistimewaan dalam bidang ekonomi dan sosial budaya, tak kunjung mampu menyelesaikan konflik.<sup>63</sup> Begitu juga dimasa Presiden Abdurrahman Wahid maupun Megawati, tampaknya kurang membuahkan hasil. Sejumlah faktor menjadi kendala, *pertama* infrastruktur pembangunan tidak berjalan dan pemerintah daerah tidak bekerja secara maksimal.

---

<sup>61</sup> Henk Schulte, *Politik Lokal di Indonesia* (Jakarta: KITLV, 2007), h.308.

<sup>62</sup> Moh. Mahfud, *Setahun Bersama Gusdur: Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit* (Jakarta: Murai Kencana, 2010), h.81.

<sup>63</sup> Darmansyah Djumala, *Soft Power untuk Aceh Resolusi Konflik dan Desentralisasi* (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.1.

Pemerintah daerah tidak berkerja karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan bagi mereka.

*Kedua*, masih kentalnya pendekatan operasi-operasi keamanan dalam menyelesaikan konflik Aceh. *Ketiga*, kebijakan yang sifatnya untuk membangun ekonomi sulit dilaksanakan karena pemerintahan daerah lumpuh, akibat konflik yang berlarut-larut. *Keempat*, walaupun telah ada gencatan senjata pada masa Megawati Soekarno Puteri melalui CoHA antara Pemerintah RI dengan GAM, Namun butir-butirnya sulit diimplemtasikan di lapangan.

Pada lain sisi muncul kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jusuf kalla yang mulai merintis kembali upaya damai, yang dipercepat oleh kehendak internasional untuk memperoleh situasi yang kondusif bagi pelaksanaan *rehabilitasi* dan *rekontruksi* di Aceh pasca tsunami.

Perundingan RI-GAM di Helsinki merupakan peristiwa penting baik bagi Aceh, Indonesia, maupun dunia, baik jika dilihat dari rangkaian sejarah politik dan kemanusiaan maupun jika dipertimbangkan dari budaya dan tindakan para aktor dari pihak-pihak yang terlibat di dalam upaya pencapaian kesepakatan politik damai RI-GAM.<sup>64</sup>

### 3. Berdirinya Partai Lokal

Dalam perundingan damai di Helsinki masalah partai politik lokal ini sempat menjadi ganjalan. *Delegasi* pemerintahan dan juga DPR dan pemerintah di Jakarta, mencurigainya sebagai benih *federalisme* dan bahkan manipulasi GAM untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan Aceh. Dari sisi GAM, partai politik lokal inilah satu-satunya cara bagi mereka untuk tetap memperjuangkan keadilan karena nyata melihat partai-partai politik yang ada tidak memperdulikan nasib rakyat Aceh atau orang di daerah pada umumnya.<sup>65</sup>

Salah satu butir kesepakatan dalm kesepakatan damai Helsinki adalah partai lokal. Butir 1.2.1. (Partisipasi Politik) MoU Helsinki tertulis:

Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan Nasional. Memahami aspirasi masyarakat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintahan RI dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh

---

h.12. <sup>64</sup> Otto Syamsuddin Ishak, *Perdamaian yang Berikhtiar yang Menentang* (Banda Aceh, ACSTF, 2009),

<sup>65</sup> Salemba Tengah, *Mengawal Demokrasi* (Jakarta: Yappika, 2007), h.108.

dengan berkonsultasi dengan DPR. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut”.<sup>66</sup>

Produk hukum sebagai implementasi butir di atas adalah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh. Respon masyarakat Aceh tentang keberadaan partai politik lokal positif. Survei Lembaga Suvei Indonesia (LSI) pada 28 Juli – 2 Agustus 2005 dan Maret 2006 menunjukkan mayoritas masyarakat Aceh mendukung pembentukan partai politik lokal. Keberadaan partai lokal ini sudah pernah dilontarkan pakar politik Indonesia dari Ohio State University, Prof William Liddle berpendapat : “Saya tentu maklum bahwa partai lokal tidak dibolehkan di Indonesia, tetapi kalau ada kemauan pasti ada cara Aceh damai. Setidaknya beri kesempatan GAM ikut bersaing dalam pemilihan umum di Aceh.”

Persiapan GAM mendirikan partai sudah terlihat akhir 2005. Keinginan tersebut ditegaskan dalam pertemuan GAM sedunia di Banda Aceh pada tanggal 23-24 Mei 2006. Partai di bawah naungan GAM diresmikan setahun setelah pertemuan tersebut, 114 bendera dan nama GAM digadang-gadang sebagai simbol yang dijual partai. Malik Mahmud dan Muzakir Manaf ditunjuk sebagai ketua dan wakil ketua, jabatan sekretaris Jenderal dipegang oleh Tengku Muhammad Nazar. Penggunaan lambang dan nama GAM menuai banyak protes.

Tidak hanya dari internal GAM, akan tetapi Pemerintah dan DPR juga menolak penggunaan simbol tersebut. Usai peresmian sekretariat partai, kepolisian kota besar Banda Aceh menyurati pimpinan Partai GAM untuk menurunkan atau menutup palang nama dikarenakan telah melanggar perjanjian Helsinki. Widodo AS dalam rapat kerja dengan komisi 1 DPR tegas mengatakan partai lokal yang menampilkan atribut GAM tidak sesuai dengan semangat perdamaian Aceh.

Banyak pihak yang menaruh curiga terhadap penggunaan nama dan lambang itu. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan nota kesepahaman. Eksistensi partai politik lokal di Aceh memang tidak menjadi perdebatan yuridis lagi ketika UU No. 11/2006 (UU Pemerintahan Aceh) dan PP No. 22/2007 tentang partai politik lokal di Aceh telah mengamanatkannya.

---

<sup>66</sup> Undang- undang Pemerintahan Aceh, *Nota Kesepahaman Pemerintah RI dan GAM*, (Banda Aceh: Demos, t.t.), h.186.

Kehadirannya juga merupakan bagian dari *road map to peace process* di Aceh seperti yang tertuang dalam kesepakatan Helsinki 15 Agustus 2005.

Dengan Undang-undang No. 11 tahun 2006 yang di keluarkan, pemilu tahun 2009 menjadi lain, kesepakatan kontestan partai politik lokal membawa nuansa baru dalam sistem demokrasi di Indonesia. Kehadiran partai politik lokal menjadi titian penting bagi proses transisi politik Aceh. Kehadiran partai politik lokal juga cermin bahwa proses berpolitik melalui jalur kepartaian yang terjadi selama ini (melalui partai politik nasional) tidak berjalan dengan sehat.

Konflik militer telah menyebabkan kemampuan melakukan partisipasi politik secara bebas tidak tercapai meskipun secara formal terdapat partai politik, parlemen, dan pemilu. Saat ini terlihat banyak aktivis partai politik nasional dan mantan pejabat yang memilih bergabung dan membentuk partai politik lokal dibandingkan memperkuat partai politik nasional yang telah mapan.

#### 4. Berdirinya Partai Aceh

Keberanian memilih dalam konteks dinamika politik Aceh saat ini, antara lain diperlihatkan oleh GAM/KPA ketika harus mengganti nama, lambang, dan ideologi partai lokalnya kesekian kalinya dalam sejarah, kini sejarah itu kembali terjadi dalam konteks politik Aceh. Partai GAM kembali mengubah nama dan lambang dari Partai Gerakan Mandiri (GAM) menjadi Partai Aceh. Walaupun perubahan ini dilihat sebagai sejarah pahit bagi GAM pada periode pertama *transformasi* menjadi gerakan politik untuk memperjuangkan nasib rakyat Aceh.

Perubahan Partai GAM menjadi Partai Aceh merupakan sesuatu yang dilaksanakan dengan sangat sadar dan tulus, walaupun sebagian penganalisa politik melihat perubahan ini merupakan sesuatu tekanan dari pemerintah pusat terhadap GAM. Sehingga GAM tidak ada pilihan untuk menyelamatkan partai agar bisa lolos dalam *verifikasi* yang dilakukan Kanwil Depkumham Aceh. Pemerintah segera menerbitkan aturan baru setelah mereka melarang lambang partai GAM. Di akhir Desember 2007, keluar Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007 tentang lambang daerah. Aturan ini menjelaskan jenis lambang daerah, kedudukan dan fungsi, desain, hingga rincian aturan penempatan lambang dan logo daerah.

Pada ayat 4 pasal 6 pada Bab Desain Lambang Daerah tercantum kalimat: Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan desain dan logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam negara kesatuan republik. Logo dan bendera organisasi terlarang maupun gerakan separatis diterangkan dalam bagian penjelasan, yaitu logo dan bendera bulan sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh, logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Papua, serta bendera benang raja yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Maluku.”

Motif pelarangan sangat jelas. Bulan sabit dan bintang merupakan lambang yang dipakai Hasan Tiro sebagai lambang pada bendera Front Pembebasan Aceh Sumatera yang diproklamasikannya pada Desember 1976. Front itu kemudian dikenal dengan nama GAM, julukan yang diberikan pemerintah terhadap gerakan kemerdekaan Aceh.

Partai GAM telah menjadi Partai Aceh yang mempunyai misi mentransformasikan sekaligus membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari persepsi partai *revolusi* menjadi partai pembangunan. Walaupun ini bukanlah suatu perkara mudah terutama dikalangan mantan anggota GAM yang sudah terbiasa melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata kemudian berubah menjadi gerakan politik pembangunan. Semua ini membutuhkan waktu untuk mentransformasikan segala pemikiran tersebut.

Peperangan telah menyebabkan pembodohan terhadap generasi Aceh serta kehancuran peradaban bangsa Aceh. Realita sejarah ini yang telah dialami selama peperangan 30 tahun di Aceh. Realita ini pula menimbulkan kesadaran elite-elite GAM untuk melakukan perjuangan politik demokrasi untuk memperjuangkan masa depan Aceh yang lebih bermartabat. Bagaimana Partai Aceh mengambil semangat perjuangan dari berbagai belahan dunia, hal ini menjadi program partai dalam menggariskan agenda-agenda pembelaan rakyat. Dengan demikian Partai Aceh akan benar-benar menjadi partai rakyat yang menjunjung tinggi kedaulatan dan kebebasan rakyat.

Partai Aceh perlu membuka diri kepada semua elemen untuk menjelaskan visi, misi dan program partai secara terbuka. Sehingga Partai Aceh akan benar menjadi satu partai alternatif bagi perjuangan rakyat Aceh, yang lebih penting Partai Aceh harus menjadi partai yang siap mempertaruhkan segala sesuatu untuk membebaskan rakyat Aceh dari segala penindasan, kebodohan dan penderitaan. Bukan sebaliknya, partai Aceh hanya perlu kepada rakyat pada saat berlangsungnya pemilihan umum.

## 1. Visi dan Misi Partai Aceh

### a. Visi

Membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan negara kesatuan republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditanda tangani pada tanggal lima belas Agustus (15-08-2005) antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

### b. Misi

Mentransformasi atau membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari citra *revolusi party* menjadi citra *development party* dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan Bangsa Indonesia.<sup>67</sup>

## 2. Azas dan Tujuan Partai Aceh

Partai politik ini berazas Pancasila dan undang undang dasar (UUD) 1945, serta *Qanun Meukuta Alam al-Arsy*.

Adapun tujuan Partai Aceh adalah:

1. Mewujudkan cita-cita rakyat demi menegakkan marwah dan martabat bangsa, agama dan negara.
2. Mewujudkan cita-cita Mou Helsingki yang ditanda tangani oleh GAM dan RI pada tanggal 15 Agustus 2005.
3. Mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur dan merata baik materil dan spiritual bagi seluruh rakyat Aceh.
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan berdemokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan hak asasi manusia.<sup>68</sup>

## 3. Doktrin dan Bai'at

---

<sup>67</sup> Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh, h.2

<sup>68</sup> *Ibid.*, h.4.

Adapun Doktrin Partai Aceh “ *udep beusare mate beusajan, sikrek gaphan saboh keurenda*, maksudnya adalah kesatuan pemikiran dan paham-paham warisan endatu yang mencerminkan kuatnya ikatan kebersamaan dalam masyarakat Aceh.

Adapun bai’at Partai Aceh adalah penegasan kebulatan tekad sebagai penghayatan doktrin untuk mewujudkan tujuan Partai Aceh. Bai’at merupakan pendorong dan penggugah semangat dalam melaksanakan perjuangan Partai Aceh.<sup>69</sup>

#### 4. Susunan Partai Aceh

##### Susunan Partai Aceh

1. Dewan Pimpinan Aceh (DPA) atau Majelis pembina/ penasihat (Majelis Tuha Peut) yaitu unsur Dewan Pimpinan Partai untuk seluruh Aceh yang berwenang membuat rancangan keputusan yang berhubungan dengan hal-hal yang mendasar dan strategis untuk dilaksanakan oleh pimpinan partai untuk seluruh Aceh, dan Dewan Pimpinan Harian partai.
2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) atau Kabupaten/ Kota terdiri dari majlis pembina/ penasihat (Majelis Tuha Peut), dan dewan pimpinan harian.
3. Dewan Pimpinan Sagoe (DPS) atau Kecamatan terdiri dari majelis pembina/ penasihat (Majelis Tuha Peut), dan dewan pimpinan harian
4. Dewan Pimpinan Mukim (DPM) terdiri dari majelis pembina/ penasihat (Majelis Tuha Peut), dan dewan pimpinan harian.
5. Dewan Pimpinan Gampong (DPG) terdiri dari majelis pembina/ penasihat (Majelis Tuha peut), dan dewan pimpinan harian.<sup>70</sup>

Sedangkan pada tingkatan Aceh, wilayah, sagoe, dan mukim dibentuk tuha lapan:

1. Tuha Lapan Aceh adalah unsur dewan pimpinan partai untuk seluruh Aceh yang berwenang memberikan usulan dan masukan kepada majelis tuha peut menyangkut dengan hal-hal yang mendasar dan strategis untuk dilaksanakan oleh pimpinan partai untuk seluruh aceh.
2. Tuha Lapan Wilayah bekerja pada tingkat Wilayah/Kabupaten
3. Tuha Lapan Sagoe bekerja pada tingkat Kecamatan

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, h.5.

<sup>70</sup> *Ibid.*, h.6

4. Tuha Lapan Mukim bekerja pada tingkat Mukim.<sup>71</sup>
5. Hubungan dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya.

Partai GAM dapat menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan sebagai sumber kader yang mempunyai ikatan sejarah sebagai pendiri dan yang didirikan serta organisasi yang menyalurkan aspirasinya kepada GAM. Partai GAM juga dapat menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya.

6. Musyawarah dan rapat-rapat

Musyawarah Besar merupakan forum kedaulatan tertinggi partai, musyawarah besar berwenang:

1. Menilai laporan pertanggungjawaban dewan pimpinan Aceh
2. Memilih ketua umum, sekretaris jendral dan kepengurusan tingkat Aceh.
3. Mengubah dan menetapkan ketentuan-ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
4. Menetapkan arah perjuangan partai.
5. Peserta musyawarah adalah dewan pimpinan Aceh, utusan dewan pimpinan wilayah dan utusan-utusan khusus yang ditetapkan oleh dewan pimpinan Aceh.
6. Diadakan satu kali dalam lima tahun dan diselenggarakan oleh dewan pimpinan Aceh. Apabila dewan pimpinan Aceh tidak dapat melaksanakan, maka musyawarah besar dapat dilaksanakan oleh majelis tuha peut dengan mempertimbangkan usulan dari tuha lapan.<sup>72</sup>

Sedangkan Musyawarah besar luar biasa dilaksanakan:

1. Apabila ketua pimpinan Aceh partai tidak dapat meneruskan kepemimpinannya terhadap sisa jabatan dalam masa tugas kepengurusan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lebih dari satu tahun, atau telah terjadi perubahan sistem ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan negara yang memerlukan penyesuaian perjuangan politik partai.
2. Diselenggarakan oleh dewan pimpinan Aceh atas usul tertulis oleh tuha lapan Aceh.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, h.15.

<sup>72</sup> *Ibid.*, h.28-29.

3. Apabila usul tertulis setelah mencapai waktu empat puluh hari. Dewan pimpinan Aceh tidak menentukan sikap untuk melaksanakan musyawarah besar luar biasa, maka musyawarah dapat dilaksanakan oleh majelis tuha peut.<sup>73</sup>

## 7. Atribut Partai

Atribut partai terdiri dari: lambang, bendera, hymne/ Mars, kartu tanda anggota, pakaian seragam dan lainnya. Ketentuan-ketentuan tentang lambang, bendera, himne/ mars, kartu tanda anggota, pakaian seragan partai GAM dan lain-lainnya diatur dalam ketetapan dewan pimpinan partai.

## 8. Keanggotaan

### Persyaratan keanggotaan

1. Anggota biasa adalah: rakyat Aceh dan orang Aceh yang telah berusia 17 tahun atau telah pernah menikah dan tidak sedang menjadi anggota partai politik lain, menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketetapan partai, dan mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi anggota partai.
2. Anggota kehormatan adalah anggota partai yang diangkat oleh dewan pimpinan Aceh (partai).
3. Anggota muda adalah rakyat Aceh yang telah berjasa atau berperan aktif kepada partai tetapi belum mendapat pengesahan dari partai sebagai anggota biasa.<sup>74</sup>

### Kewajiban Anggota

1. Anggota Biasa: menghayati serta mengamalkan doktrin dan bai'at Partai Aceh, mentaati dan melaksanakan seluruh keputusan musyawarah besar dan keputusan-keputusan partai yang lainnya, membantu pimpinan dan melaksanakan tugas partai, mengamankan dan memperkuat seluruh misi dan konsep partai, menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan partai, menghadiri musyawarah, rapat-rapat dan seluruh kegiatan partai, serta membayar uang pangkal dan uang iuran bulanan partai.

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, h.29-30.

<sup>74</sup>*Ibid.*, h.10

2. Anggota kehormatan: mempunyai kewajiban khusus yang ditetapkan oleh dewan pimpinan partai seluruh Aceh
3. Anggota muda: berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan partai, menjaga dan menjunjung tinggi marwah partai, dan menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan partai.<sup>75</sup>

Hak-hak anggota:

1. Anggota biasa: menyampaikan pendapat secara lisan atau tulisan, mengikuti kegiatan partai, menduduki jabatan dalam kepengurusan partai, menduduki jabatan publik atas keputusan atau sokongan/ dukungan pimpinan partai, memperoleh kartu anggota, dan membela diri.
2. Anggota kehormatan memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur dan ditetapkan oleh dewan pimpinan Aceh (partai).
3. Anggota muda berhak menyampaikan pendapat secara tertulis kepada pimpinan partai, ikut serta dalam upacara-upacara kehormatan partai dan berpartisipasi dalam kegiatan partai yang bersifat kepanitiaan.<sup>76</sup>

#### **D. Kajian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zahari, dengan judul “Strategi Komunikasi Partai Aceh dalam Pemenangan Pemilihan Legislatif tahun 2009 Wilayah Samudera Pase Kabupaten Aceh Utara (analisis perspektif komunikasi politik Islam)”. Tesis Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, tahun 2014. Penelitian ini lebih memfokuskan tentang strategi komunikasi Partai Aceh dalam pemenangan pemilihan legislatif tahun 2009, berdasarkan temuan dan analisa terhadap berbagai sumber penelitian ini dapat menunjukkan bahwa Partai Aceh melakukan strategi komunikasi politik Islam. Berdasarkan hasil analisis data, temuan dan pembahasan penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Partai Aceh dalam menghadapi pemilu untuk memenangkan pemilihan legislatif 2009 wilayah Samudera Pasee menggunakan strategi politik ke atas dan strategi politik ke

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*, h.11

bawah. Untuk menjalankan strategi politik tersebut maka PA melakukan strategi komunikasi politik secara demokrasi terstruktur mulai dari tingkatan Dewan Pimpinan Aceh (DPA), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan *Sagoe* (DPS), Dewan Pimpinan Mukim (DPM), sampai Dewan Pimpinan *Gampoeng* (DPG).

Faktor kemenangan yang menentukan kemenangan Partai Aceh yaitu adanya mesin politik yang kuat, adapun mesin politik PA komite peralihan Aceh, yang di dalamnya mantan kombatan gerakan Aceh merdeka mulai panglima Aceh, panglima komando operasi, sampai *geusyik* gerakan Aceh merdeka, ulama Aceh, yang menjadi faktor penghambat PA pada pemilihan legislatif tahun 2009 yaitu pendanaan, infrastruktur partai, minimnya calon legislatif dari perempuan dan kurangnya kader yang bisa mencalonkan diri untuk menjadi calon legislatif dari PA sendiri. Oleh karena itu PA memilih kader yang berkualitas dan figur yang populer yang diterima oleh lapisan masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari PA.

Untuk mencapai kemenangan Partai Aceh melakukan berbagai macam strategi komunikasi politik yang lainnya. Secara Islam pada dasarnya PA di bentuk atas dasar ketentuan-ketentuan secara Islam, maka PA menjalankan politik sesuai dengan ketentuan konsep Islam. Namun hambatan di lapangan banyak simpatisan PA yang melakukan strategi komunikasi politik yang belum sesuai dengan konsep Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Salamina, Program studi komunikasi Islam dengan judul “Komunikasi Politik Gerakan Aceh Merdeka dalam Membangun Ideologi Masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 1999-2000”. Tesis Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, tahun 2010 Menjelaskan bahwa kelompok Gerakan Aceh Merdeka merangkul rakyat dengan komunikasi politik, seperti melakukan propaganda. Propaganda adalah salah satu dari dua berperangan yang dilakukan oleh GAM. Perang pertama menggunakan senjata, sedangkan perang kedua dengan melakukan propaganda. Proses komunikasi politik GAM dalam menanamkan ideologi melalui empat fase atau tahapan proses komunikasi yaitu tahapan kesadaran, perhatian atau minat, tahap menerima informasi, menguji atau mencoba informasi.

Proses komunikasi GAM dilakukan secara sistematis dan berjenjang baik komunikasi politik secara vertikal maupun horizontal. proses komunikasi politik Hasan di Tiro dengan kelompok GAM di Aceh dilakukan dengan orang-orang tertentu, dari

petinggi GAM yang dapat dipercaya seperti Teungku Abdullah Syafii panglima tertinggi GAM pusat di Tiro, Muzakir Manaf wakil panglima pusat, Abu Sanusi, dan Tengku Syarifuddin menteri perhubungan.

Media Komunikasi yang digerakkan GAM sangat terbatas hanya mampu menyampaikan berita dari satu, dua atau beberapa orang, Media pada masa tersebut adalah Handphone Satelit, HP (Handphone), dan surat-surat yang dikirim oleh Wali Negara untuk membangkitkan pasukan GAM dalam berjuang. Handphone satelit satu-satunya alat komunikasi yang diandalkan oleh kelompok GAM dalam melakukan koordinasi baik dengan pimpinan pusat, maupun dengan wilayah serta panglima *Sago*.

Kelompok GAM juga menggunakan lambang-lambang komunikasi dalam menanamkan ideologi masyarakat. Sebagaimana yang diketahui atribut, simbol-simbol yang berkenaan dengan GAM pada masa DOM tidak boleh dinampakkan, karena hal tersebut sebagai identitas anggota, pendukung atau simpatisan GAM. Tetapi setelah DOM dicabut di Aceh, lambang GAM bermunculan, seperti bendera GAM. Kelompok GAM telah terang-terangan memampangkam bendera GAM. Dinding bangunan yang tidak dimanfaatkan, tembok, bahkan papan pamflet nama yang telah dipajang diubah catnya dengan bendera GAM. Ada juga yang mengibarkan bendera GAM di tempat umum dan pohon kayu yang tinggi dengan ukuran yang besar.

Teknik komunikasi sebagaimana yang tertera pada Ikhtisar komunikasi yang digunakan oleh GAM dalam membangun ideologi masyarakat adalah komunikasi informatif, komunikasi persuasif, komunikasi instruktif koersif, dan hubungan manusiawi. Keempat teknik ini digunakan oleh GAM dalam menanamkan ideologi masyarakat, dan dari keempat teknik tersebut yang paling dominan adalah informatif, persuasif dan hubungan manusiawi, sedangkan koersif digunakan pada waktu tertentu.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shaleh, program studi Komunikasi Islam dengan judul “Efektivitas Komunikasi Nonverbal dalam Pelestarian Syariat Islam di Kota Lhokseumawe.” Tesis, program pascasarjana IAIN Sumatera Utara pada tahun 2011. Penelitian ini menjelaskan beberapa model komunikasi nonverbal yang digunakan oleh dinas syariat Islam di kota Lhokseumawe adalah melalui spanduk dan baliho, komunikasi juga dilakukan dengan mencetak dan memperbanyak isi *Qanun* tentang syariat Islam untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Dengan beberapa cara tersebut

diharapkan komunikasi nonverbal tentang pelestarian syariat Islam sampai kepada masyarakat sehingga masyarakat aturan-aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan syariat Islam di kota Lhoksemawe. Selain itu media massa juga menjadi satu pilihan untuk mengkomunikasikan *Qanun-qanun* yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam. Selain lewat media cetak, komunikasi juga dilakukan melalui penerbitan buku-buku serial syariat Islam.